



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.409, 2017

BKPM. Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah. Penetapan. Perubahan.

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMETAAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 107 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah diundangkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penetapan Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal;
- b. bahwa dalam rangka evaluasi hasil pemetaan pemerintahan di bidang penanaman modal di provinsi dan kabupaten/kota, perlu melakukan penyempurnaan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penetapan Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penetapan Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG PENANAMAN MODAL.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penetapan Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di

Bidang Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1218), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Evaluasi terhadap hasil pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan sesuai kebutuhan tingkat dan intensitas beban kerja masing-masing daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.
 - (2) Dalam hal tingkat dan intensitas beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan kebutuhan, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat menyampaikan perubahan data indikator variabel kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
 - (3) Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Kementerian Dalam Negeri secara bersama-sama melakukan evaluasi atas perubahan data indikator variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Hasil evaluasi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar pembuatan rekomendasi oleh Kementerian Dalam Negeri.
 - (5) Rekomendasi Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar penetapan hasil pemetaan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal.
2. Mengubah Lampiran, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal II

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 2017

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG PERUBAHAN PERATURAN KEPALA BADAN
KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG PENETAPAN HASIL PEMETAAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG PENANAMAN MODALHASIL PEMETAAN INTENSITAS DAN BEBAN KERJA URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SELURUH
INDONESIA

NO.	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	TINGKAT DAN INTENSITAS BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
PROVINSI ACEH			
1.	Provinsi Aceh	858	BESAR
1.1.	Kab. Aceh Barat	770	SEDANG
1.2.	Kab. Aceh Besar	682	SEDANG
1.3.	Kab. Aceh Selatan	704	SEDANG
1.4.	Kab. Aceh Singkil	532	KECIL
1.5.	Kab. Aceh Tengah	880	BESAR
1.6.	Kab. Aceh Tenggara	440	KECIL
1.7.	Kab. Aceh Timur	836	BESAR
1.8.	Kab. Aceh Utara	814	BESAR
1.9.	Kab. Bireuen	1,056	BESAR
1.10.	Kab. Pidie	836	BESAR
1.11.	Kab. Simeulue	602	SEDANG
1.12.	Kota Banda Aceh	1,012	BESAR
1.13.	Kota Sabang	715	SEDANG
1.14.	Kota Langsa	462	KECIL
1.15.	Kota Lhokseumawe	803	BESAR
1.16.	Kab. Gayo Lues	638	SEDANG
1.17.	Kab. Aceh Barat Daya	726	SEDANG
1.18.	Kab. Aceh Jaya	814	BESAR
1.19.	Kab. Nagan Raya	682	SEDANG
1.20.	Kab. Aceh Tamiang	616	SEDANG
1.21.	Kab. Bener Meriah	682	SEDANG
1.22.	Kab. Pidie Jaya	792	SEDANG
1.23.	Kota Subulussalam	517	SEDANG
PROVINSI SUMATERA UTARA			
2.	Provinsi Sumatera Utara	836	BESAR

NO.	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	TINGKAT DAN INTENSITAS BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
2.1.	Kab. Asahan	880	BESAR
2.2.	Kab. Dairi	792	SEDANG
2.3.	Kab. Deli Serdang	1,100	BESAR
2.4.	Kab. Karo	858	BESAR
2.5.	Kab. Labuhan Batu	792	SEDANG
2.6.	Kab. Langkat	858	BESAR
2.7.	Kab. Mandailing Natal	792	SEDANG
2.8.	Kab. Nias	1,023	BESAR
2.9.	Kab. Simalungun	836	BESAR
2.10.	Kab. Tapanuli Selatan	792	SEDANG
2.11.	Kab. Tapanuli Tengah	704	SEDANG
2.12.	Kab. Tapanuli Utara	836	BESAR
2.13.	Kab. Toba Samosir	781	SEDANG
2.14.	Kota Binjai	770	SEDANG
2.15.	Kota Medan	1,012	BESAR
2.16.	Kota Pematang Siantar	836	BESAR
2.17.	Kota Sibolga	693	SEDANG
2.18.	Kota Tanjung Balai	682	SEDANG
2.19.	Kota Tebing Tinggi	649	SEDANG
2.20.	Kota Padangsidempuan	638	SEDANG
2.21.	Kab. Pakpak Bharat	616	SEDANG
2.22.	Kab. Nias Selatan	924	BESAR
2.23.	Kab. Humbang Hasundutan	759	SEDANG
2.24.	Kab. Serdang Bedagai	638	SEDANG
2.25.	Kab. Samosir	693	SEDANG
2.26.	Kab. Batu Bara	704	SEDANG
2.27.	Kab. Padang Lawas	748	SEDANG
2.28.	Kab. Padang Lawas Utara	858	BESAR
2.29.	Kab. Labuhan Batu Selatan	715	SEDANG
2.30.	Kab. Labuhan Batu Utara	572	KECIL
2.31.	Kab. Nias Utara	980	BESAR
2.32.	Kab. Nias Barat	798	SEDANG
2.33.	Kota Gunung Sitoli	980	BESAR
PROVINSI SUMATERA BARAT			
3.	Provinsi Sumatera Barat	770	SEDANG
3.1.	Kab. Lima puluh Kota	880	BESAR
3.2.	Kab. Agam	880	BESAR
3.3.	Kab. Kepulauan Mentawai	840	BESAR
3.4.	Kab. Padang Pariaman	902	BESAR
3.5.	Kab. Pasaman	770	SEDANG
3.6.	Kab. Pesisir Selatan	880	BESAR
3.7.	Kab. Sijunjung	781	SEDANG
3.8.	Kab. Solok	682	SEDANG

NO.	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	TINGKAT DAN INTENSITAS BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
3.9.	Kab. Tanah Datar	814	BESAR
3.10.	Kota Bukit Tinggi	858	BESAR
3.11.	Kota Padang Panjang	616	SEDANG
3.12.	Kota Padang	1,034	BESAR
3.13.	Kota Payakumbuh	759	SEDANG
3.14.	Kota Sawahlunto	605	SEDANG
3.15.	Kota Solok	638	SEDANG
3.16.	Kota Pariaman	649	SEDANG
3.17.	Kab. Pasaman Barat	858	BESAR
3.18.	Kab. Dharmasraya	869	BESAR
3.19.	Kab. Solok Selatan	759	SEDANG
PROVINSI RIAU			
4.	Provinsi Riau	990	BESAR
4.1.	Kab. Bengkalis	660	SEDANG
4.2.	Kab. Indragiri Hilir	814	BESAR
4.3.	Kab. Indragiri Hulu	902	BESAR
4.4.	Kab. Kampar	880	BESAR
4.5.	Kab. Kuantan Singingi	440	KECIL
4.6.	Kab. Pelalawan	792	SEDANG
4.7.	Kab. Rokan Hilir	638	SEDANG
4.8.	Kab. Rokan Hulu	814	BESAR
4.9.	Kab. Siak	836	BESAR
4.10.	Kota Dumai	814	BESAR
4.11.	Kota Pekanbaru	1,012	BESAR
4.12.	Kab. Kepulauan Meranti	616	SEDANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU			
5.	Provinsi Kepulauan Riau	854	BESAR
5.1.	Kab. Natuna	812	BESAR
5.2.	Kab. Kep. Anambas	490	KECIL
5.3.	Kab. Karimun	952	BESAR
5.4.	Kota Batam	1,288	BESAR
5.5.	Kota Tanjung Pinang	882	BESAR
5.6.	Kab. Lingga	476	KECIL
5.7.	Kab. Bintan	1,036	BESAR
PROVINSI JAMBI			
6.	Provinsi Jambi	737	SEDANG
6.1.	Kab. Batang Hari	638	SEDANG
6.2.	Kab. Bungo	858	BESAR
6.3.	Kab. Kerinci	484	KECIL
6.4.	Kab. Merangin	748	SEDANG
6.5.	Kab. Muaro Jambi	704	SEDANG
6.6.	Kab. Sarolangun	440	KECIL
6.7.	Kab. Tanjung Jabung Barat	616	SEDANG

NO.	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	TINGKAT DAN INTENSITAS BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
6.8.	Kab. Tanjung Jabung Timur	814	BESAR
6.9.	Kab. Tebo	616	SEDANG
6.10.	Kota Jambi	990	BESAR
6.11.	Kota Sungai Penuh	737	SEDANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN			
7.	Provinsi Sumatera Selatan	803	BESAR
7.1.	Kab. Lahat	924	BESAR
7.2.	Kab. Musi Banyuasin	880	BESAR
7.3.	Kab. Musi Rawas	704	SEDANG
7.4.	Kab. Muara Enim	946	BESAR
7.5.	Kab. Ogan Komering Ilir	858	BESAR
7.6.	Kab. Ogan Komering Ulu	440	KECIL
7.7.	Kota Palembang	1,078	BESAR
7.8.	Kota Pagar Alam	759	SEDANG
7.9.	Kota Lubuk Linggau	737	SEDANG
7.10.	Kota Prabumulih	836	BESAR
7.11.	Kab. Banyuasin	1,034	BESAR
7.12.	Kab. Ogan Ilir	440	KECIL
7.13.	Kab. OKU Timur	946	BESAR
7.14.	Kab. OKU Selatan	352	SANGAT KECIL
7.15.	Kab. Empat Lawang	660	SEDANG
7.16.	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	737	SEDANG
7.17.	Kab. Musi Rawas Utara	847	BESAR
PROVINSI BANGKA BELITUNG			
8.	Provinsi Bangka Belitung	910	BESAR
8.1.	Kab. Bangka	1,064	BESAR
8.2.	Kab. Belitung	644	SEDANG
8.3.	Kota Pangkal Pinang	1,148	BESAR
8.4.	Kab. Bangka Selatan	938	BESAR
8.5.	Kab. Bangka Tengah	770	SEDANG
8.6.	Kab. Bangka Barat	966	BESAR
8.7.	Kab. Belitung Timur	630	SEDANG
PROVINSI BENGKULU			
9.	Provinsi Bengkulu	847	BESAR
9.1.	Kab. Bengkulu Selatan	671	SEDANG
9.2.	Kab. Bengkulu Utara	616	SEDANG
9.3.	Kab. Rejang Lebong	704	SEDANG
9.4.	Kota Bengkulu	858	BESAR
9.5.	Kab. Kaur	649	SEDANG
9.6.	Kab. Seluma	605	SEDANG
9.7.	Kab. Mukomuko	781	SEDANG
9.8.	Kab. Lebong	638	SEDANG

NO.	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	TINGKAT DAN INTENSITAS BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
9.9.	Kab. Kepahiang	748	BESAR
9.10.	Kab. Bengkulu Tengah	759	SEDANG
PROVINSI LAMPUNG			
10.	Provinsi Lampung	1,078	BESAR
10.1.	Kab. Lampung Barat	770	SEDANG
10.2.	Kab. Lampung Selatan	660	SEDANG
10.3.	Kab. Lampung Tengah	814	BESAR
10.4.	Kab. Lampung Utara	880	BESAR
10.5.	Kab. Lampung Timur	462	KECIL
10.6.	Kab. Tanggamus	704	SEDANG
10.7.	Kab. Tulang Bawang	748	SEDANG
10.8.	Kab. Way Kanan	726	SEDANG
10.9.	Kota Bandar Lampung	1,078	BESAR
10.10.	Kota Metro	737	SEDANG
10.11.	Kab. Pesawaran	792	SEDANG
10.12.	Kab. Pringsewu	748	SEDANG
10.13.	Kab. Mesuji	715	SEDANG
10.14.	Kab. Tulang Bawang Barat	858	BESAR
10.15.	Kab. Pesisir Barat	715	SEDANG
PROVINSI JAWA BARAT			
11.	Provinsi Jawa Barat	1,000	BESAR
11.1.	Kab. Bandung	880	BESAR
11.2.	Kab. Bekasi	820	BESAR
11.3.	Kab. Bogor	1,000	BESAR
11.4.	Kab. Ciamis	820	BESAR
11.5.	Kab. Cianjur	900	BESAR
11.6.	Kab. Cirebon	920	BESAR
11.7.	Kab. Garut	900	BESAR
11.8.	Kab. Indramayu	910	BESAR
11.9.	Kab. Karawang	1,000	BESAR
11.10.	Kab. Kuningan	960	BESAR
11.11.	Kab. Majalengka	900	BESAR
11.12.	Kab. Purwakarta	840	BESAR
11.13.	Kab. Subang	840	BESAR
11.14.	Kab. Sukabumi	860	BESAR
11.15.	Kab. Sumedang	860	BESAR
11.16.	Kab. Tasikmalaya	660	SEDANG
11.17.	Kota Bandung	1,045	BESAR
11.18.	Kota Bekasi	990	BESAR
11.19.	Kota Bogor	990	BESAR
11.20.	Kota Cirebon	880	BESAR
11.21.	Kota Depok	979	BESAR
11.22.	Kota Sukabumi	638	SEDANG

NO.	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	TINGKAT DAN INTENSITAS BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
11.23.	Kota Cimahi	792	SEDANG
11.24.	Kota Tasikmalaya	715	SEDANG
11.25.	Kota Banjar	737	SEDANG
11.26.	Kab. Bandung Barat	780	SEDANG
11.27.	Kab. Pangandaran	700	SEDANG
PROVINSI BANTEN			
12.	Provinsi Banten	1,000	BESAR
12.1.	Kab. Lebak	780	SEDANG
12.2.	Kab. Pandeglang	1,000	BESAR
12.3.	Kab. Serang	850	BESAR
12.4.	Kab. Tangerang	1000	BESAR
12.5.	Kota Cilegon	869	BESAR
12.6.	Kota Tangerang	891	BESAR
12.7.	Kota Serang	913	BESAR
12.8.	Kota Tangerang Selatan	1,056	BESAR
PROVINSI JAWA TENGAH			
13.	Provinsi Jawa Tengah	860	BESAR
13.1.	Kab. Banjarnegara	480	KECIL
13.2.	Kab. Banyumas	840	BESAR
13.3.	Kab. Batang	720	SEDANG
13.4.	Kab. Blora	740	SEDANG
13.5.	Kab. Boyolali	800	SEDANG
13.6.	Kab. Brebes	720	SEDANG
13.7.	Kab. Cilacap	1,000	BESAR
13.8.	Kab. Demak	860	BESAR
13.9.	Kab. Grobogan	780	SEDANG
13.10.	Kab. Jepara	660	SEDANG
13.11.	Kab. Karanganyar	620	SEDANG
13.12.	Kab. Kebumen	860	BESAR
13.13.	Kab. Kendal	760	SEDANG
13.14.	Kab. Klaten	640	SEDANG
13.15.	Kab. Kudus	720	SEDANG
13.16.	Kab. Magelang	800	SEDANG
13.17.	Kab. Pati	720	SEDANG
13.18.	Kab. Pekalongan	640	SEDANG
13.19.	Kab. Pemasang	660	SEDANG
13.20.	Kab. Purbalingga	780	SEDANG
13.21.	Kab. Purworejo	740	SEDANG
13.22.	Kab. Rembang	780	SEDANG
13.23.	Kab. Semarang	720	SEDANG
13.24.	Kab. Sragen	960	BESAR
13.25.	Kab. Sukoharjo	690	SEDANG
13.26.	Kab. Tegal	720	SEDANG

NO.	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	TINGKAT DAN INTENSITAS BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
13.27.	Kab. Temanggung	660	SEDANG
13.28.	Kab. Wonogiri	880	BESAR
13.29.	Kab. Wonosobo	720	SEDANG
13.30.	Kota Magelang	693	SEDANG
13.31.	Kota Pekalongan	737	SEDANG
13.32.	Kota Salatiga	660	SEDANG
13.33.	Kota Semarang	1,056	BESAR
13.34.	Kota Surakarta	880	BESAR
13.35.	Kota Tegal	704	SEDANG
PROVINSI DI YOGYAKARTA			
14.	Provinsi DI Yogyakarta		
14.1.	Kab. Bantul	830	BESAR
14.2.	Kab. Gunung Kidul	920	BESAR
14.3.	Kab. Kulon Progo	950	BESAR
14.4.	Kab. Sleman	830	BESAR
14.5.	Kota Yogyakarta	627	SEDANG
PROVINSI JAWA TIMUR			
15.	Provinsi Jawa Timur	880	BESAR
15.1.	Kab. Bangkalan	500	KECIL
15.2.	Kab. Banyuwangi	860	BESAR
15.3.	Kab. Blitar	440	KECIL
15.4.	Kab. Bojonegoro	780	SEDANG
15.5.	Kab. Bondowoso	800	SEDANG
15.6.	Kab. Gresik	780	SEDANG
15.7.	Kab. Jember	420	KECIL
15.8.	Kab. Jombang	940	BESAR
15.9.	Kab. Kediri	880	BESAR
15.10.	Kab. Lamongan	680	SEDANG
15.11.	Kab. Lumajang	420	KECIL
15.12.	Kab. Madiun	580	KECIL
15.13.	Kab. Magetan	720	SEDANG
15.14.	Kab. Malang	840	BESAR
15.15.	Kab. Mojokerto	860	BESAR
15.16.	Kab. Nganjuk	1,000	BESAR
15.17.	Kab. Ngawi	980	BESAR
15.18.	Kab. Pacitan	760	SEDANG
15.19.	Kab. Pamekasan	740	SEDANG
15.20.	Kab. Pasuruan	860	BESAR
15.21.	Kab. Ponorogo	700	SEDANG
15.22.	Kab. Probolinggo	880	BESAR
15.23.	Kab. Sampang	960	BESAR
15.24.	Kab. Sidoarjo	940	BESAR
15.25.	Kab. Situbondo	720	SEDANG

NO.	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	TINGKAT DAN INTENSITAS BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
15.26.	Kab. Sumenep	420	KECIL
15.27.	Kab. Trenggalek	780	SEDANG
15.28.	Kab. Tuban	660	SEDANG
15.29.	Kab. Tulungagung	880	BESAR
15.30.	Kota Blitar	759	SEDANG
15.31.	Kota Kediri	902	BESAR
15.32.	Kota Madiun	484	KECIL
15.33.	Kota Malang	946	BESAR
15.34.	Kota Mojokerto	660	SEDANG
15.35.	Kota Pasuruan	737	SEDANG
15.36.	Kota Probolinggo	814	BESAR
15.37.	Kota Surabaya	1,034	BESAR
15.38.	Kota Batu	814	BESAR
PROVINSI KALIMANTAN BARAT			
16.	Provinsi Kalimantan Barat	770	SEDANG
16.1.	Kab. Bengkayang	420	KECIL
16.2.	Kab. Landak	792	SEDANG
16.3.	Kab. Kapuas Hulu	560	KECIL
16.4.	Kab. Ketapang	792	SEDANG
16.5.	Kab. Mempawah	704	SEDANG
16.6.	Kab. Sambas	616	SEDANG
16.7.	Kab. Sanggau	1,036	BESAR
16.8.	Kab. Sintang	704	SEDANG
16.9.	Kota Pontianak	858	BESAR
16.10.	Kota Singkawang	660	SEDANG
16.11.	Kab. Sekadau	737	SEDANG
16.12.	Kab. Melawi	704	SEDANG
16.13.	Kab. Kayong Utara	682	SEDANG
16.14.	Kab. Kubu Raya	836	BESAR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH			
17.	Provinsi Kalimantan Tengah	1,012	BESAR
17.1.	Kab. Barito Selatan	616	SEDANG
17.2.	Kab. Barito Utara	836	BESAR
17.3.	Kab. Kapuas	748	SEDANG
17.4.	Kab. Kotawaringin Barat	638	SEDANG
17.5.	Kab. Kotawaringin Timur	814	BESAR
17.6.	Kota Palangkaraya	990	BESAR
17.7.	Kab. Katingan	814	BESAR
17.8.	Kab. Seruyan	682	SEDANG
17.9.	Kab. Sukamara	682	SEDANG
17.10.	Kab. Lamandau	803	BESAR
17.11.	Kab. Gunung Mas	704	SEDANG
17.12.	Kab. Pulang Pisau	803	BESAR

NO.	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	TINGKAT DAN INTENSITAS BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
17.13.	Kab. Murung Raya	814	BESAR
17.14.	Kab. Barito Timur	605	SEDANG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN			
18.	Provinsi Kalimantan Selatan	704	SEDANG
18.1.	Kab. Banjar	814	BESAR
18.2.	Kab. Barito Kuala	638	SEDANG
18.3.	Kab. Hulu Sungai Selatan	704	SEDANG
18.4.	Kab. Hulu Sungai Tengah	352	SANGAT KECIL
18.5.	Kab. Hulu Sungai Utara	704	SEDANG
18.6.	Kab. Kotabaru	836	BESAR
18.7.	Kab. Tabalong	704	SEDANG
18.8.	Kab. Tanah Laut	792	SEDANG
18.9.	Kab. Tapin	616	SEDANG
18.10.	Kota Banjarbaru	902	BESAR
18.11.	Kota Banjarmasin	957	BESAR
18.12.	Kab. Balangan	726	SEDANG
18.13.	Kab. Tanah Bumbu	748	SEDANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR			
19.	Provinsi Kalimantan Timur	836	BESAR
19.1.	Kab. Kutai Kartanegara	1,078	BESAR
19.2.	Kab. Kutai Barat	726	SEDANG
19.3.	Kab. Kutai Timur	660	SEDANG
19.4.	Kab. Paser	682	SEDANG
19.5.	Kota Balikpapan	1,078	BESAR
19.6.	Kota Bontang	781	SEDANG
19.7.	Kota Samarinda	770	SEDANG
19.8.	Kab. Berau	770	SEDANG
19.9.	Kab. Penajam Paser Utara	462	KECIL
19.10.	Kab. Mahakam Ulu	462	KECIL
PROVINSI KALIMANTAN UTARA			
20.	Provinsi Kalimantan Utara	854	BESAR
20.1.	Kab. Bulungan	952	BESAR
20.2.	Kab. Malinau	532	KECIL
20.3.	Kab. Nunukan	672	SEDANG
20.4.	Kota Tarakan	704	SEDANG
20.5.	Kab. Tana Tidung	728	SEDANG
PROVINSI SULAWESI UTARA			
21.	Provinsi Sulawesi Utara	1,022	BESAR
21.1.	Kab. Bolaang Mongondow	561	KECIL
21.2.	Kab. Minahasa	858	BESAR
21.3.	Kab. Kepulauan Sangihe	910	BESAR
21.4.	Kota Bitung	847	BESAR
21.5.	Kota Manado	286	SANGAT SANGAT KECIL

NO.	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	TINGKAT DAN INTENSITAS BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
21.6.	Kab. Kepulauan Talaud	854	BESAR
21.7.	Kab. Minahasa Selatan	528	KECIL
21.8.	Kota Tomohon	748	SEDANG
21.9.	Kab. Minahasa Utara	473	KECIL
21.10.	Kota Kotamobagu	693	SEDANG
21.11.	Kab. Bolaang Mongondow Utara	638	SEDANG
21.12.	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	476	KECIL
21.13.	Kab. Minahasa Tenggara	759	SEDANG
21.14.	Kab. Bolaang Mangondow Timur	792	SEDANG
21.15.	Kab. Bolaang Mangondow Selatan	352	SANGAT KECIL
PROVINSI GORONTALO			
22.	Provinsi Gorontalo	704	SEDANG
22.1.	Kab. Boalemo	770	SEDANG
22.2.	Kab. Gorontalo	770	SEDANG
22.3.	Kota Gorontalo	792	SEDANG
22.4.	Kab. Pohuwato	737	SEDANG
22.5.	Kab. Bone Bolango	649	SEDANG
22.6.	Kab. Gorontalo Utara	704	SEDANG
PROVINSI SULAWESI TENGAH			
23.	Provinsi Sulawesi Tengah	979	BESAR
23.1.	Kab. Banggai	748	SEDANG
23.2.	Kab. Banggai Kepulauan	825	BESAR
23.3.	Kab. Buol	924	BESAR
23.4.	Kab. Toli-Toli	869	BESAR
23.5.	Kab. Donggala	858	BESAR
23.6.	Kab. Morowali	836	BESAR
23.7.	Kab. Poso	748	SEDANG
23.8.	Kota Palu	968	BESAR
23.9.	Kab. Parigi Moutong	726	SEDANG
23.10.	Kab. Tojo Una Una	836	BESAR
23.11.	Kab. Sigi	748	SEDANG
23.12.	Kab. Banggai Laut	781	SEDANG
23.13.	Kab. Morowali Utara	825	BESAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN			
24.	Provinsi Sulawesi Selatan	1,045	BESAR
24.1.	Kab. Bantaeng	803	BESAR
24.2.	Kab. Barru	968	BESAR
24.3.	Kab. Bone	946	BESAR
24.4.	Kab. Bulukumba	1,012	BESAR
24.5.	Kab. Enrekang	924	BESAR
24.6.	Kab. Gowa	1,034	BESAR

NO.	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	TINGKAT DAN INTENSITAS BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
24.7.	Kab. Jeneponto	990	BESAR
24.8.	Kab. Luwu	880	BESAR
24.9.	Kab. Luwu Utara	902	BESAR
24.10.	Kab. Maros	814	BESAR
24.11.	Kab. Pangkajene Kepulauan	1,120	BESAR
24.12.	Kota Palopo	803	BESAR
24.13.	Kab. Luwu Timur	726	SEDANG
24.14.	Kab. Pinrang	924	BESAR
24.15.	Kab. Sinjai	880	BESAR
24.16.	Kab. Kepulauan Selayar	882	BESAR
24.17.	Kab. Sidenreng Rappang	748	SEDANG
24.18.	Kab. Soppeng	748	SEDANG
24.19.	Kab. Takalar	781	SEDANG
24.20.	Kab. Tana Toraja	748	SEDANG
24.21.	Kab. Wajo	880	BESAR
24.22.	Kota Parepare	792	SEDANG
24.23.	Kota Makassar	1,001	BESAR
24.24.	Kab. Toraja Utara	847	BESAR
PROVINSI SULAWESI BARAT			
25.	Provinsi Sulawesi Barat	1,100	BESAR
25.1.	Kab. Majene	715	SEDANG
25.2.	Kab. Mamuju	924	BESAR
25.3.	Kab. Polewali Mandar	880	BESAR
25.4.	Kab. Mamasa	913	BESAR
25.5.	Kab. Mamuju Utara	836	BESAR
25.6.	Kab. Mamuju Tengah	572	KECIL
PROVINSI SULAWESI TENGGARA			
26.	Provinsi Sulawesi Tenggara	869	BESAR
26.1.	Kab. Buton	671	SEDANG
26.2.	Kab. Konawe	880	BESAR
26.3.	Kab. Kolaka	858	BESAR
26.4.	Kab. Muna	532	KECIL
26.5.	Kota Kendari	847	BESAR
26.6.	Kota Bau-bau	803	BESAR
26.7.	Kab. Konawe Selatan	594	KECIL
26.8.	Kab. Bombana	759	SEDANG
26.9.	Kab. Wakatobi	630	SEDANG
26.10.	Kab. Kolaka Utara	825	BESAR
26.11.	Kab. Konawe Utara	473	KECIL
26.12.	Kab. Buton Utara	638	SEDANG
26.13.	Kab. Konawe Kepulauan	476	KECIL
26.14.	Kab. Kolaka Timur	812	BESAR
26.15.	Kab. Muna Barat	490	KECIL

NO.	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	TINGKAT DAN INTENSITAS BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
26.16.	Kab. Buton Tengah	868	BESAR
26.17.	Kab. Buton Selatan	644	SEDANG
PROVINSI BALI			
27.	Provinsi Bali	968	BESAR
27.1.	Kab. Badung	860	BESAR
27.2.	Kab. Bangli	710	SEDANG
27.3.	Kab. Buleleng	760	SEDANG
27.4.	Kab. Gianyar	860	BESAR
27.5.	Kab. Jembrana	680	SEDANG
27.6.	Kab. Karangasem	700	SEDANG
27.7.	Kab. Klungkung	680	SEDANG
27.8.	Kab. Tabanan	820	BESAR
27.9.	Kota Denpasar	990	BESAR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT			
28.	Provinsi Nusa Tenggara Barat	814	BESAR
28.1.	Kab. Bima	324	SANGAT KECIL
28.2.	Kab. Dompu	384	SANGAT KECIL
28.3.	Kab. Lombok Barat	864	BESAR
28.4.	Kab. Lombok Tengah	984	BESAR
28.5.	Kab. Lombok Timur	720	SEDANG
28.6.	Kab. Sumbawa	792	SEDANG
28.7.	Kota Mataram	816	BESAR
28.8.	Kota Bima	732	SEDANG
28.9.	Kab. Sumbawa Barat	840	BESAR
28.10.	Kab. Lombok Utara	756	SEDANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR			
29.	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1,218	BESAR
29.1.	Kab. Alor	672	SEDANG
29.2.	Kab. Belu	828	BESAR
29.3.	Kab. Ende	1,080	BESAR
29.4.	Kab. Flores Timur	816	BESAR
29.5.	Kab. Kupang	912	BESAR
29.6.	Kab. Lembata	636	SEDANG
29.7.	Kab. Manggarai	816	BESAR
29.8.	Kab. Ngada	828	BESAR
29.9.	Kab. Sikka	936	BESAR
29.10.	Kab. Sumba Barat	816	BESAR
29.11.	Kab. Sumba Timur	648	SEDANG
29.12.	Kab. Timor Tengah Selatan	864	BESAR
29.13.	Kab. Timor Tengah Utara	816	BESAR
29.14.	Kota Kupang	1,140	BESAR
29.15.	Kab. Rote Ndao	816	BESAR
29.16.	Kab. Manggarai Barat	804	BESAR

NO.	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	TINGKAT DAN INTENSITAS BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
29.17.	Kab. Nagekeo	828	BESAR
29.18.	Kab. Sumba Barat Daya	468	KECIL
29.19.	Kab. Sumba Tengah	288	SANGAT SANGAT KECIL
29.20.	Kab. Manggarai Timur	876	BESAR
29.21.	Kab. Sabu Raijua	780	SEDANG
29.22.	Kab. Malaka	828	BESAR
PROVINSI MALUKU			
30.	Provinsi Maluku	826	BESAR
30.1.	Kab. Maluku Tenggara Barat	792	SEDANG
30.2.	Kab. Maluku Tengah	672	SEDANG
30.3.	Kab. Maluku Tenggara	1,162	BESAR
30.4.	Kab. Buru	540	KECIL
30.5.	Kota Ambon	1,080	BESAR
30.6.	Kab. Seram Bagian Barat	624	SEDANG
30.7.	Kab. Seram Bagian Timur	612	SEDANG
30.8.	Kab. Kepulauan Aru	602	SEDANG
30.9.	Kota Tual	798	SEDANG
30.10.	Kab. Maluku Barat Daya	360	SANGAT KECIL
30.11.	Kab. Buru Selatan	516	KECIL
PROVINSI MALUKU UTARA			
31.	Provinsi Maluku Utara	742	SEDANG
31.1.	Kab. Halmahera Tengah	720	SEDANG
31.2.	Kota Ternate	1,078	BESAR
31.3.	Kab. Halmahera Barat	966	BESAR
31.4.	Kab. Halmahera Timur	182	SANGAT SANGAT KECIL
31.5.	Kab. Halmahera Selatan	1,092	BESAR
31.6.	Kab. Halmahera Utara	1,274	BESAR
31.7.	Kab. Kepulauan Sula	938	BESAR
31.8.	Kota. Tidore Kepulauan	1,008	BESAR
31.9.	Kab. Pulau Morotai	938	BESAR
31.10.	Kab. Pulau Taliabu	120	SANGAT SANGAT KECIL
PROVINSI PAPUA			
32.	Provinsi Papua	980	BESAR
32.1.	Kab. Biak Numfor	672	SEDANG
32.2.	Kab. Jayapura	896	BESAR
32.3.	Kab. Jayawijaya	420	KECIL
32.4.	Kab. Merauke	1,064	BESAR
32.5.	Kab. Mimika	1,008	BESAR
32.6.	Kab. Nabire	840	BESAR
32.7.	Kab. Paniai	980	BESAR
32.8.	Kab. Puncak Jaya	364	SANGAT KECIL
32.9.	Kab. Kepulauan Yapen	868	BESAR
32.10.	Kota Jayapura	1,012	BESAR

NO.	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	TINGKAT DAN INTENSITAS BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
32.11.	Kab. Sarmi	896	BESAR
32.12.	Kab. Keerom	532	KECIL
32.13.	Kab. Yahukimo	1,008	BESAR
32.14.	Kab. Pegunungan Bintang	420	KECIL
32.15.	Kab. Tolikara	896	BESAR
32.16.	Kab. Boven Digoel	448	KECIL
32.17.	Kab. Mappi	420	KECIL
32.18.	Kab. Asmat	616	SEDANG
32.19.	Kab. Waropen	532	KECIL
32.20.	Kab. Supiori	378	SANGAT KECIL
32.21.	Kab. Mamberamo Raya	462	SANGAT KECIL
32.22.	Kab. Membramo Tengah	420	KECIL
32.23.	Kab. Yalimo	420	KECIL
32.24.	Kab. Lanny Jaya	252	SANGAT SANGAT KECIL
32.25.	Kab. Nduga	308	SANGAT KECIL
32.26.	Kab. Dogiyai	966	BESAR
32.27.	Kab. Puncak	448	KECIL
32.28.	Kab. Intan Jaya	392	SANGAT KECIL
32.29.	Kab. Deiyai	308	SANGAT KECIL
PROVINSI PAPUA BARAT			
33.	Provinsi Papua Barat	826	BESAR
33.1.	Kab. Fak Fak	1,036	BESAR
33.2.	Kab. Manokwari	560	KECIL
33.3.	Kab. Sorong	896	BESAR
33.4.	Kota Sorong	966	BESAR
33.5.	Kab. Raja Ampat	616	SEDANG
33.6.	Kab. Sorong Selatan	462	KECIL
33.7.	Kab. Teluk Bintuni	168	SANGAT SANGAT KECIL
33.8.	Kab. Teluk Wondama	826	BESAR
33.9.	Kab. Kaimana	392	KECIL
33.10.	Kab. Maybrat	378	SANGAT KECIL
33.11.	Kab. Tambrau	350	SANGAT KECIL
33.12.	Kab. Manokwari Selatan	854	BESAR
33.13.	Kab. Pegunungan Arfak	420	KECIL

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIC INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG